# SURAT TUGAS
**104/LP2M/IPI/YPI/V/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua LPPM Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa menerangkan bahwa:

Nama : **Suryani Jihad, S.Pd,M.Pd.**
Pekerjaan : Dosen
NIP/NIDN : 0902039001
Instansi : Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa

Dengan ini menugaskan kepada:

Nama : **Fadly Yashari Soumena, S.E., M.Si**
Pekerjaan : Dosen Tetap
NIDN : 2119129301
Instansi : Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa

adalah benar Dosen Tetap Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa yang berkolaborasi dengan mahasiswa atas nama Nurul fadilah (Prodi Ekonomi Syariah) diberikan tugas kepada yang bersangkutan melaksanakan Penelitian dengan judul " **"Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam."**

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Gowa, 6 Mei 2025
8 Dzulqadah 1446 H

Ketua LP2M IPI

**Suryani Jihad, S.Pd,M.Pd.**
**NIDN.0902039001**

*Tembusan:*
*Rektor IPI Gowa*
*Kaprodi Ekonomi Syariah IPI Gowa*

E-ISSN 3032-7016
Jurnal Ekonomi Islam

**Jurnal Ekonomi Islam**
Vol. (3) No. (1) (Juni) (2025) : 56-86
DOI : https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.501

# Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam

**Nurul Fadila[1], Fadly Yashari Soumena[2]**
[1,2]Institut Aisyiyah Sulawesi Selatan
Email: nf9933384@gmail.com[1] , fadly.yashari@gmail.com[2]

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan praktik keuangan Islam, yang menghambat partisipasi terhadap sistem keuangan syariah. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis bentuk serta dampak sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dari sumber-sumber ilmiah dan institusional lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kebijakan, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi digital terbukti efektif dalam memperluas jangkauan literasi dan meningkatkan inklusi keuangan syariah. Pemerintah berperan sebagai perumus arah kebijakan, sedangkan lembaga keuangan syariah menjalankan edukasi praktis. Kolaborasi dalam bentuk pelatihan, kurikulum, dan media digital berhasil mendorong keterlibatan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala seperti lemahnya koordinasi, ketimpangan wilayah, dan keterbatasan kualitas SDM. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kompetensi pelaksana program literasi, dan standardisasi materi edukasi berbasis maqashid syariah guna menciptakan literasi ekonomi Islam yang merata dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pemerintah, lembaga keuangan, dan literasi ekonomi islam

***Abstract***

*This study is grounded in the low level of public understanding regarding Islamic economic principles, which continues to hinder broader participation in the Islamic financial system. The main objective is to analyze the forms and impacts of synergy between the government and Islamic financial institutions in enhancing Islamic economic literacy in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative*


This journal is an open-access article under a CC BY-SA 4.0 license. © 2025, the author(s)

*approach using literature review methods based on scholarly articles, official reports, and relevant publications from the past five years. Findings reveal that integrated policies, public education initiatives, and the use of digital technologies have positively contributed to expanding literacy and increasing Islamic financial inclusion. The government functions as a policy director, while Islamic financial institutions implement practical education in the field. Collaborative programs—such as community training, curriculum development, and digital education platforms—have effectively encouraged public engagement. Nevertheless, challenges remain, particularly in inter-agency coordination, regional disparities, and limited human resource capacity. The study recommends strengthening national coordination structures, improving the competency of literacy agents, and standardizing educational materials based on maqashid al-shariah to foster sustainable Islamic economic literacy.*

***Keywords:*** *The government, financial institutions, and islamic economic literacy.*

## Pendahuluan

Literasi ekonomi Islam merupakan pondasi esensial dalam mendukung terbentuknya masyarakat yang sadar nilai dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam sistem keuangan syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi Islam. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah masih sangat rendah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 9,1 persen, jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mendekati angka 50 persen Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa transformasi menuju sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Lemahnya literasi ekonomi Islam bukan hanya menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah, tetapi juga memperkuat kesenjangan antara tujuan normatif ekonomi Islam dan realitas partisipasi masyarakat (Nur Arifin, 2025).

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa upaya literasi ekonomi Islam cenderung berjalan secara sektoral dan tidak terintegrasi antara lembaga satu dan lainnya. Rendahnya literasi keuangan syariah terjadi tidak hanya pada masyarakat umum, tetapi juga pada kelompok terdidik seperti mahasiswa. Dengan keterbatasan akses terhadap media edukatif dan kurangnya integrasi kurikulum ekonomi Islam dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, lembaga keuangan syariah seringkali gagal dalam menyampaikan edukasi nilai secara komprehensif karena fokus yang masih dominan pada target bisnis. Sementara itu, pemerintah telah menyusun peta jalan pengembangan keuangan syariah

nasional, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala koordinasi lintas sektor. Ketimpangan wilayah, lemahnya sumber daya manusia, dan minimnya materi edukasi berbasis budaya lokal menjadi hambatan yang memerlukan penanganan serius dan sistematis (KEUANGAN & ISRO'HARAHAP, n.d.).

Berdasarkan kajian tersebut, kebutuhan akan pendekatan kolaboratif menjadi semakin mendesak. Sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan struktural dan substansial dalam upaya peningkatan literasi ekonomi Islam. Pemerintah memiliki posisi sebagai pengarah arah kebijakan dan penyedia regulasi, sedangkan lembaga keuangan syariah berada di garis depan dalam menyampaikan edukasi praktis melalui produk dan layanan keuangan yang mereka kelola. Sinergi ini tidak hanya penting dari sisi teknis pelaksanaan, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berdaya saing. bentuk kolaborasi seperti pelatihan masyarakat, integrasi kurikulum, hingga digitalisasi edukasi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat (Rofiullah, 2025).

Keberadaan sinergi ini menunjukkan arah baru dalam strategi literasi keuangan syariah yang lebih partisipatif, inklusif, dan berbasis nilai. Artikel ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui pendekatan analisis terhadap bentuk dan dampak dari sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam satu kerangka naratif terpadu. Fokus kajian diarahkan untuk mengidentifikasi peran masing-masing aktor, model kolaborasi yang terbentuk, serta dampaknya terhadap tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah sejauh mana sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan literasi ekonomi Islam dan bagaimana tantangan-tantangan yang muncul dapat diantisipasi melalui kebijakan kolaboratif (Iskandar, 2024). Tujuan dari kajian ini ialah untuk menggambarkan dinamika sinergi kelembagaan dalam mendorong literasi, mengevaluasi efektivitas program kolaboratif yang telah dijalankan, serta merumuskan strategi penguatan sinergi ke depan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual dan berkelanjutan. Dengan kerangka ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik serta praktik kebijakan yang relevan bagi pemangku kepentingan di bidang ekonomi Islam.

Fenomena rendahnya literasi ekonomi Islam tidak hanya berdampak pada rendahnya pemanfaatan produk keuangan syariah, tetapi juga pada melemahnya peran masyarakat dalam mendukung sistem ekonomi Islam secara menyeluruh.

Banyak individu Muslim yang secara ideologis mendukung nilai-nilai syariah, namun tidak memiliki kapasitas kognitif dan praktis untuk menerapkannya dalam aktivitas ekonomi harian (Afriyanti & Fadillah, 2025). Keadaan ini memperkuat kebutuhan akan pendekatan literasi yang tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Lembaga keuangan syariah di satu sisi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan nilai-nilai syariah secara lebih sistematis, sementara di sisi lain membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung literasi secara luas. Sinergi antar aktor inilah yang menjadi titik tumpu penting dalam mendorong reformasi kesadaran ekonomi Islam secara kolektif (Hanafi, 2023).

Selain dari sisi masyarakat, tantangan literasi juga muncul dari struktur kelembagaan lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menjadikan edukasi sebagai bagian inti dari strategi bisnisnya. Banyak lembaga masih memosisikan literasi hanya sebagai aktivitas promosi, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis nilai. Akibatnya, pendekatan literasi menjadi transaksional dan terbatas pada aspek teknis produk, tanpa menyentuh dimensi filosofis yang seharusnya menjadi keunikan sistem keuangan Islam (Naini, 2023). Kondisi ini mempertegas urgensi reformulasi strategi kelembagaan yang lebih integratif antara kepentingan bisnis dan misi edukatif. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan publik memiliki peran penting dalam mendorong pembentukan iklim regulasi yang mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih aktif mengambil peran sebagai agen literasi (Rahman, 2024).

Urgensi kolaborasi juga semakin meningkat ketika memperhatikan dinamika sosial dan teknologi saat ini. Masyarakat semakin terpapar oleh berbagai pilihan produk keuangan, baik konvensional maupun digital, yang membutuhkan tingkat pemahaman tinggi agar tidak terjebak pada transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah (Irawan, 2025). Dalam konteks ini, peran sinergis antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat strategis, tidak hanya untuk memberikan pemahaman dasar, tetapi juga membentuk sikap kritis dan kesadaran nilai di tengah derasnya arus informasi. Keberadaan media sosial, platform edukasi daring, serta transformasi digital sektor keuangan membuka peluang besar untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan beragam, namun tanpa kolaborasi antar pihak, potensi tersebut sulit untuk dimaksimalkan (Kecil & Muthoharoh, n.d.)

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini diposisikan untuk mengisi ruang kajian yang masih jarang disentuh secara holistik, yaitu mengenai bentuk, dinamika, dan dampak sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi ekonomi

Islam. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada pemetaan konsep, tetapi juga pada identifikasi tantangan dan perumusan strategi kolaboratif ke depan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan literasi ekonomi Islam di Indonesia secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang etis dan inklusif.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bentuk dan dampak sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi artikel ilmiah yang telah melalui proses peer-review, laporan resmi dari lembaga negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta publikasi akademik lain yang tersedia melalui basis data terakreditasi nasional dan platform ilmiah seperti Google Scholar. Untuk menjamin kualitas dan keandalan data yang digunakan, dilakukan seleksi literatur berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu kesesuaian topik dengan fokus penelitian, kredibilitas institusi penerbit, dan keterkinian publikasi yang dibatasi dalam rentang lima tahun terakhir (2020–2025). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yang dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap tema-tema kunci yang mencerminkan peran masing-masing aktor, pola kolaborasi yang terbentuk, serta kontribusinya terhadap literasi ekonomi Islam. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis dokumen dan perspektif kelembagaan guna memperoleh hasil yang konsisten dan terverifikasi. Seluruh hasil analisis dikaji secara kritis dan disusun dalam narasi akademik yang sistematis, sejalan dengan tujuan utama penelitian untuk memberikan pemahaman yang utuh dan argumentatif mengenai dinamika sinergi kelembagaan dalam mendorong peningkatan literasi ekonomi Islam yang berkelanjutan.

## Hasil dan Pembahasan

### Minimnya literasi ekonomi islam di indonesia

Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tingkat literasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Berbagai survei nasional

menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah masih sangat terbatas. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 mencatat bahwa literasi keuangan syariah masyarakat hanya mencapai sekitar 9,1 persen, jauh tertinggal dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang sudah mendekati 50 persen (Afriyanti & Fadillah, 2025). Ketimpangan ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat potensi besar bagi pengembangan sistem keuangan berbasis syariah, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan mekanisme ekonomi Islam. Rendahnya literasi ini berdampak langsung pada rendahnya inklusi keuangan syariah, yang tercermin dari jumlah pengguna aktif layanan keuangan syariah yang relatif kecil dibandingkan populasi Muslim Indonesia yang mendominasi lebih dari 80 persen penduduk (Naini, 2023).

Penelitian yang dilakukan pada kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah hanya sebesar 8,93 persen, menunjukkan bahwa bahkan di lingkungan akademik yang relatif melek informasi, pengetahuan tentang ekonomi Islam masih jauh dari memadai. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya literasi ini meliputi kurangnya eksposur terhadap pendidikan ekonomi Islam sejak dini, belum optimalnya integrasi kurikulum ekonomi syariah di jenjang pendidikan formal, serta dominasi narasi ekonomi konvensional dalam ruang publik. Di samping itu, pendekatan komunikasi dan edukasi oleh lembaga keuangan syariah seringkali belum mampu menyederhanakan terminologi dan konsep yang ada, sehingga masyarakat awam merasa kesulitan memahami manfaat dan mekanisme produk syariah. Minimnya literasi ekonomi Islam juga dipengaruhi oleh terbatasnya media edukatif yang dapat diakses secara luas, baik dalam bentuk digital maupun cetak, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota (Hidayah, 2021).

Fenomena ini menciptakan kesenjangan struktural antara pertumbuhan industri keuangan syariah dengan kesiapan masyarakat untuk mengadopsi layanan tersebut secara aktif dan sadar. Padahal, literasi ekonomi Islam yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang tidak hanya patuh secara spiritual, tetapi juga cerdas secara ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, rendahnya literasi ini menjadi penghambat signifikan bagi perluasan basis ekonomi syariah dan pencapaian target inklusi keuangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam secara holistik dan aplikatif. Tanpa perbaikan mendasar pada aspek literasi ini, transformasi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam akan sulit terwujud secara optimal dalam struktur ekonomi Indonesia yang terus berkembang (Yudhira, 2024).

Ketidakseragaman pendekatan edukasi antara lembaga keuangan syariah turut memperburuk keadaan. Perbedaan dalam penjelasan konsep, praktik akad,

dan strategi pemasaran menimbulkan inkonsistensi informasi yang diterima masyarakat. Interpretasi yang bervariasi terhadap akad murabahah atau ijarah, meskipun telah memiliki dasar hukum yang seragam melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), mengindikasikan lemahnya standarisasi penerapan nilai syariah pada tingkat operasional. Keadaan ini menciptakan kebingungan publik dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memiliki otoritas dalam menjaga integritas syariah di setiap lembaga, seharusnya berfungsi lebih dari sekadar pemberi persetujuan administratif. Peran edukatif DPS perlu diperluas agar dapat menjadi kanal penyebaran informasi yang kredibel serta dapat memperkuat pemahaman publik terhadap hakikat ekonomi syariah yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi (Rahman, 2024).

Minimnya eksposur ekonomi Islam pada media arus utama juga menjadi kendala struktural yang belum terselesaikan secara optimal. Narasi publik tentang ekonomi lebih banyak didominasi oleh paradigma kapitalistik yang berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan, sedangkan wacana keuangan syariah sering terbatas pada momen keagamaan tertentu, seperti Ramadhan atau Hari Raya Idul Fitri. Media massa, termasuk media digital, belum menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian dari agenda edukatif yang berkelanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya persepsi masyarakat terhadap relevansi ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang kredibel dan kompetitif. Pendekatan literasi yang mengandalkan ceramah atau seminar formal dinilai kurang efektif dalam menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan konten digital dan visual. Strategi penyebaran informasi yang bersifat partisipatif, seperti video pendek, podcast, infografis, dan narasi berbasis pengalaman nyata, lebih potensial untuk menciptakan pemahaman dan keterlibatan yang bermakna (Habiburrohman, 2021).

Peningkatan literasi ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari peran kolaboratif antar pemangku kepentingan. Upaya yang bersifat sporadis dan sektoral belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pemahaman masyarakat. Diperlukan desain kebijakan literasi yang mencakup integrasi antara regulasi, kurikulum pendidikan, program industri, serta penyebaran informasi publik secara inklusif dan adaptif. Literasi ekonomi Islam perlu didekati sebagai instrumen strategis pembangunan sosial yang mampu memperkuat kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Keberhasilan program literasi tidak hanya diukur dari peningkatan angka inklusi keuangan syariah, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat dalam memilih produk keuangan berdasarkan pertimbangan nilai dan kebermanfaatan sosial (Aldana, 2023).

Permasalahan literasi ekonomi Islam tidak dapat disederhanakan semata-mata sebagai kesenjangan pengetahuan antara masyarakat dan institusi keuangan. Di balik itu, terdapat struktur sosial dan historis yang membentuk rendahnya penerimaan masyarakat terhadap terminologi dan mekanisme

ekonomi berbasis syariah. Selama lebih dari setengah abad, masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan pendekatan ekonomi konvensional yang menekankan rasionalitas pasar, bunga (interest), dan persaingan bebas. Pola ini membentuk cara pandang publik terhadap keuangan sebagai praktik utilitarian semata, bukan sebagai aktivitas bermuatan nilai spiritual atau etika. Ketika sistem keuangan syariah diperkenalkan secara masif melalui lembaga formal, masyarakat mengalami disonansi kognitif antara pengetahuan yang telah tertanam dan nilai-nilai baru yang diperkenalkan melalui istilah teknis seperti *akad*, *fiqh muamalah*, *gharar*, atau *riba*. Kurangnya proses transisi kultural ini menyebabkan terjadinya resistensi pasif atau bahkan penolakan terhadap instrumen syariah, terutama di luar komunitas Muslim teredukasi (Tri Wahyuni, 2023).

Masalah berikutnya menyangkut disparitas sumber daya manusia pada sektor keuangan syariah yang berperan langsung dalam penyuluhan dan edukasi. Sebagian besar petugas lapangan yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi produk belum memiliki pemahaman konseptual yang memadai mengenai prinsip syariah. Mereka umumnya lebih terlatih dalam aspek teknis dan administratif ketimbang substansi teologis yang mendasari produk. Kesenjangan kompetensi ini menyebabkan proses edukasi menjadi mekanistik dan minim argumentasi nilai. Masyarakat akhirnya menganggap produk syariah sebagai duplikasi dari produk konvensional yang diberi label agama, bukan sebagai sistem alternatif yang menyeluruh. Ketiadaan pelatihan literasi yang terstruktur dan bersertifikat bagi pelaku industri juga menghambat terciptanya ekosistem edukatif yang holistik dan terstandar secara nasional. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya koordinasi antara lembaga pelatihan keuangan syariah, universitas Islam, dan regulator dalam menyusun modul literasi yang terpadu dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat (Kecil & Muthoharoh, n.d.).

Selain dimensi edukasi formal, aspek literasi fungsional juga belum sepenuhnya mendapat perhatian. Masyarakat, khususnya pada lapisan menengah ke bawah, memerlukan pemahaman yang langsung terhubung dengan kehidupan ekonomi sehari-hari. Mereka lebih membutuhkan contoh konkret seperti bagaimana menyusun perencanaan keuangan keluarga sesuai prinsip syariah, bagaimana membedakan praktik konsumsi halal dan thayyib, atau bagaimana mengelola pinjaman mikro yang tidak mengandung unsur riba. Literasi ekonomi Islam yang berorientasi akademik tidak serta-merta menjawab kebutuhan praktis tersebut. Perlu dikembangkan pendekatan berbasis kasus riil yang menggambarkan situasi ekonomi rumah tangga, UMKM, dan pelaku informal sebagai bagian dari strategi peningkatan literasi yang lebih relevan dan aplikatif. Penyusunan modul literasi berbasis budaya lokal, serta keterlibatan tokoh agama dan komunitas, akan memperkuat legitimasi program edukasi di tingkat akar rumput (Muhtar, n.d.).

Sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam peningkatan literasi ekonomi Islam merupakan suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip

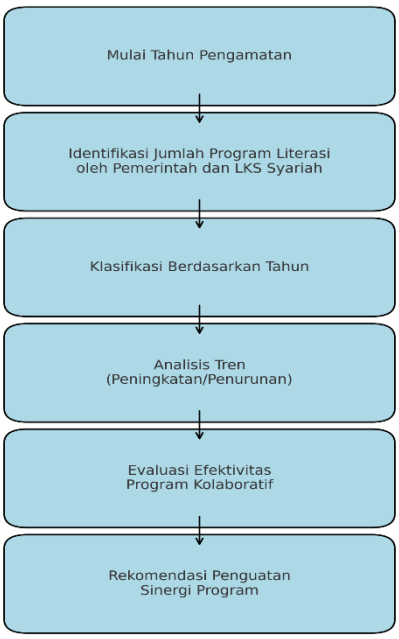


ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, tetapi juga menjadi wujud nyata dari integrasi peran negara dan sektor keuangan Islam dalam menciptakan ekosistem literasi yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan umat (Ulfanur, Asysyura, Isra, & Eryani, 2024). Melalui proses observasi yang dimulai dari penentuan tahun pengamatan, upaya ini diarahkan pada identifikasi kuantitatif terhadap program literasi yang telah dilaksanakan oleh kedua pihak, baik secara independen maupun melalui kemitraan strategis. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tahun pelaksanaan guna memperoleh gambaran dinamis tentang penyebaran dan intensitas kegiatan literasi dari waktu ke waktu. Tahapan analisis tren dilakukan untuk mengidentifikasi pola peningkatan atau penurunan aktivitas literasi, yang menjadi dasar bagi evaluasi efektivitas program kolaboratif yang telah dijalankan. Evaluasi ini mencakup aspek kualitas pelaksanaan, jangkauan audiens, serta dampak nyata terhadap perubahan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disusun rekomendasi penguatan sinergi program, baik dari segi kebijakan, metode pelatihan, maupun penyelarasan strategi komunikasi. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan LKS syariah tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi ekonomi Islam, tetapi juga mempercepat transformasi sistem keuangan menuju model yang lebih etis, transparan, dan berkeadilan (Mukhlisin, 2022)

Dimensi kebijakan juga memainkan peran krusial dalam mengatasi problem literasi. Selama ini, upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam masih berjalan terfragmentasi antar lembaga dan tidak memiliki satu platform koordinasi terpadu. Masing-masing instansi menjalankan

program literasi sesuai mandat sektoral, sehingga tidak jarang terjadi tumpang tindih atau kekosongan wilayah garapan. Sebagai contoh, program edukasi keuangan oleh OJK dan Bank Indonesia belum secara eksplisit memuat penguatan narasi nilai-nilai Islam sebagai fondasi keuangan syariah (Desy Rahmawati Anwar, Sumarlin, & Abdullah, 2025)l. Di sisi lain, kementerian keagamaan belum banyak menjangkau aspek keuangan rumah tangga dan investasi halal dalam kurikulum dakwah atau pendidikan madrasah. Kondisi ini memerlukan pendekatan lintas sektor yang menggabungkan otoritas keuangan, pendidikan, agama, dan media informasi. Desain kebijakan nasional yang berfokus pada literasi ekonomi Islam sebagai strategi pembangunan nilai sangat diperlukan untuk mempercepat proses transformasi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika spiritual (Desy Rahmawati Anwar et al., 2025).

Literasi ekonomi Islam bukanlah agenda jangka pendek yang dapat dicapai melalui sosialisasi sesaat. Proses ini membutuhkan kesabaran institusional dan investasi sumber daya yang berkelanjutan, baik dari sisi finansial maupun struktural. Penguatan literasi harus diiringi dengan reformasi sistemik pada tata kelola produk syariah, pembentukan narasi publik yang inklusif, dan penyusunan indikator keberhasilan yang tidak hanya berbasis kuantitas pengguna, tetapi juga kualitas pemahaman dan perubahan perilaku. Ketika masyarakat telah mampu memahami, mengkritisi, dan memilih produk ekonomi berdasarkan nilai dan integritas, maka sistem keuangan Islam tidak lagi dipandang sebagai alternatif pinggiran, melainkan sebagai bagian utama dari tatanan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkeadaban (Afandi, Erdayani, & others, 2022).

**Peran Pemerintah sebagai Pengarah Kebijakan Literasi Syariah**

Pemerintah memiliki posisi strategis dalam membentuk arah dan kebijakan nasional terkait penguatan literasi ekonomi syariah. Sebagai pemegang otoritas regulatif, peran pemerintah bukan hanya sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai fasilitator dan inisiator yang menjembatani berbagai pemangku kepentingan. Melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Kementerian Agama, sejumlah langkah telah diambil untuk membangun ekosistem literasi ekonomi Islam yang terintegrasi (Hidayat & Ali, 2024). KNEKS, misalnya, telah menetapkan peta jalan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang mencakup aspek literasi sebagai pilar utama. OJK melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) terus memperluas program edukatif yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk santri, pelajar, dan pelaku UMKM. Selain itu, Bank Indonesia telah mengembangkan platform digital seperti Sharia Digital Ecosystem untuk mendukung penyebaran informasi ekonomi syariah secara masif dan inklusif (Amalia, Rahmatillah, & Muslim, 2023).

Langkah pemerintah juga tercermin dalam penyusunan kurikulum pendidikan ekonomi berbasis syariah yang mulai diintegrasikan ke satuan

pendidikan formal dan vokasional. Inisiatif ini menunjukkan upaya sistematis untuk tidak hanya mencetak pengguna produk keuangan syariah, tetapi juga membentuk generasi muda yang memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam secara rasional dan aplikatif. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama pada sisi harmonisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga. Banyak program literasi berjalan sendiri-sendiri tanpa platform koordinasi nasional yang kuat. Fragmentasi ini sering menyebabkan tumpang tindih kegiatan serta kesenjangan wilayah sasaran, khususnya di daerah dengan indeks literasi rendah. Pemerintah perlu membangun sinergi yang kuat bersama lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan komunitas masyarakat agar kebijakan literasi tidak hanya bersifat formal administratif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang mendorong transformasi sosial-ekonomi umat (Muhammadiyah, 2022).

Arah kebijakan pemerintah juga harus responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika preferensi generasi muda. Penyusunan regulasi literasi digital berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi dominasi arus informasi yang tidak selalu sesuai prinsip syariah. Intervensi kebijakan yang menggabungkan pendekatan digital, kolaboratif, dan berbasis data menjadi kunci untuk mendorong peningkatan pemahaman publik terhadap sistem keuangan Islam (Sulaeman, 2025). Peran pemerintah tidak dapat berhenti pada ranah normatif dan legal-formal semata, melainkan harus menjangkau aspek substansial edukasi, inovasi model literasi, dan penguatan narasi publik mengenai ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang adil, etis, dan berkelanjutan (Azam, 2024).

Pemerintah tidak hanya berperan dalam merancang strategi literasi ekonomi syariah, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan yang disusun mampu menyesuaikan diri terhadap heterogenitas sosial dan geografis masyarakat Indonesia. Perbedaan tingkat pendidikan, budaya lokal, dan akses terhadap teknologi menuntut kebijakan literasi yang fleksibel, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan nyata komunitas. Penyusunan kebijakan tidak cukup hanya berbentuk dokumen strategi atau peta jalan, tetapi juga harus dikawal hingga pada tingkat implementasi dan evaluasi. Evaluasi berkelanjutan dibutuhkan agar program literasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memiliki indikator keberhasilan yang terukur, seperti perubahan perilaku keuangan, peningkatan permintaan terhadap produk syariah, serta perluasan jangkauan edukasi ke wilayah yang selama ini terabaikan (Ardiansyah et al., 2025).

Sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam peningkatan literasi ekonomi Islam merupakan wujud konkret dari kolaborasi strategis dua aktor utama pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas regulatif dan perumus kebijakan publik, memiliki peran sentral dalam menciptakan kerangka kerja, standar edukasi, dan fasilitas pendukung yang memungkinkan terwujudnya literasi ekonomi Islam yang masif dan merata (Mukhlisin, 2022). Di sisi lain, lembaga keuangan syariah

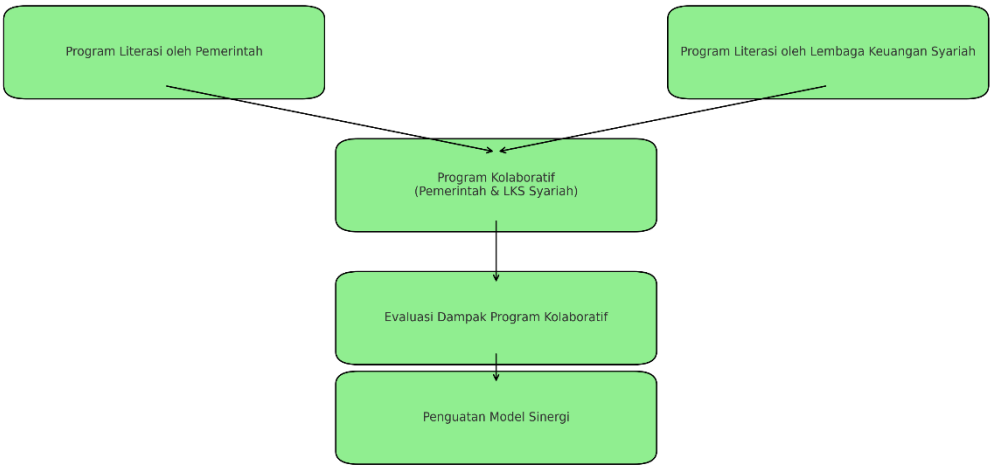


sebagai pelaku utama dalam sistem keuangan Islam memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat melalui produk dan layanan berbasis akad-akad syariah, serta berkewajiban menyampaikan edukasi praktis yang menjembatani pemahaman konseptual dengan pengalaman finansial umat. Program literasi yang diselenggarakan secara terpisah oleh masing-masing pihak seringkali menghadapi keterbatasan jangkauan, duplikasi agenda, dan inkonsistensi pesan yang disampaikan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang terstruktur dan terukur, di mana kedua entitas tersebut menyatukan sumber daya, metode, serta platform komunikasi dalam satu kesatuan program yang saling melengkapi. Tahap awal kolaborasi ini diawali dengan integrasi dari program literasi masing-masing pihak ke dalam satu bentuk kerja sama terpadu yang disebut sebagai program kolaboratif. Program ini kemudian dievaluasi secara sistematis guna mengukur efektivitasnya, baik dari sisi kuantitatif (jumlah peserta, jangkauan wilayah) maupun kualitatif (perubahan pemahaman, penerimaan terhadap produk syariah). Hasil evaluasi menjadi dasar penguatan model sinergi ke depan, agar strategi literasi ekonomi Islam tidak hanya bersifat simbolik atau seremonial, melainkan mampu membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi Islam dan mendorong partisipasi aktif dalam membangun sistem keuangan yang etis, adil, dan inklusif (Sasbianto, Dimas, Saleh, & others, 2025).

Dalam menjalankan fungsi regulatif dan fasilitatif, pemerintah juga perlu memperkuat sinergi antar institusi yang selama ini masih bekerja secara sektoral. Koordinasi antara OJK, KNEKS, BI, dan kementerian teknis seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama, perlu diformalkan dalam bentuk lembaga kerja sama atau forum koordinasi literasi ekonomi Islam nasional. Forum ini akan berfungsi sebagai pengendali arah, penghubung antar program, serta wadah evaluasi berkala (Fauziyanti, Estuti, Hendrayanti, Ernawati, & Budiyono, 2022). Tanpa struktur koordinasi yang terintegrasi, program literasi

berpotensi tumpang tindih atau bahkan tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan intervensi. Selain itu, keterlibatan pemda juga menjadi faktor penting, mengingat pendekatan literasi akan jauh lebih efektif ketika dilaksanakan secara desentralisasi, menyesuaikan dengan kearifan lokal dan potensi komunitas daerah.

Langkah konkret pemerintah juga dapat diperkuat melalui insentif kebijakan yang mendorong lembaga keuangan syariah, sekolah, pesantren, dan universitas Islam untuk aktif menyelenggarakan program literasi berbasis masyarakat. Misalnya, insentif fiskal bagi lembaga keuangan syariah yang mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk kegiatan edukasi ekonomi Islam (Wati & Fasa, 2025). Program beasiswa atau bantuan operasional literasi untuk institusi pendidikan berbasis Islam juga dapat menjadi pendorong penting bagi pelibatan sektor pendidikan. Selain itu, pemerintah dapat membentuk badan akreditasi atau sertifikasi nasional untuk modul literasi ekonomi Islam yang terstandarisasi, sehingga setiap kegiatan edukasi memiliki kualitas dan acuan yang seragam, baik dari sisi materi, metode, maupun penyampaian (Leniwita *et al.*, 2023).

Penguatan kebijakan literasi juga memerlukan keberanian untuk memasukkan konten ekonomi Islam ke dalam agenda pembangunan nasional secara eksplisit. Selama ini, keberadaan ekonomi Islam sering diposisikan sebagai subsektor, bukan sebagai bagian dari strategi utama penguatan daya saing ekonomi nasional. Jika literasi ekonomi Islam ingin menjadi gerakan nasional yang berdampak luas, maka narasi kebijakan harus dibangun ulang untuk memposisikan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai pilar penguatan kemandirian ekonomi umat. Prinsip keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan yang menjadi fondasi ekonomi Islam seharusnya tidak hanya menjadi tema akademik, tetapi menjadi orientasi dalam penyusunan kebijakan publik yang menyentuh sektor keuangan, perdagangan, dan pembangunan sosial (Abdul Arifin & others, n.d.).

Upaya pemerintah tidak akan efektif apabila tidak dibarengi dengan transformasi cara pandang birokrasi terhadap urgensi ekonomi syariah. Peningkatan kapasitas pegawai publik yang terlibat dalam program literasi menjadi sangat krusial. Pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip, praktik, dan perkembangan keuangan syariah perlu diberikan kepada aparatur yang menjalankan fungsi edukatif maupun kebijakan, agar mampu mengkomunikasikan program secara tepat sasaran. Aparatur pemerintah yang memahami konsep ekonomi Islam secara menyeluruh akan lebih mampu menanamkan nilai-nilai tersebut ke dalam masyarakat melalui pendekatan edukatif, bukan sekadar administratif. Proses ini akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap kesungguhan negara dalam membangun tatanan ekonomi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berakar pada nilai-nilai yang diyakini (Aep Saepul Anwar, 2020).

Peran pemerintah juga dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi dan data analitik untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Pengembangan dashboard nasional literasi keuangan syariah, yang terintegrasi dengan data demografis, ekonomi, dan geografis, akan membantu pemerintah dalam menetapkan prioritas wilayah intervensi secara tepat sasaran. Teknologi informasi juga memungkinkan evaluasi real-time terhadap efektivitas program literasi yang sedang berlangsung, serta mengidentifikasi kendala teknis atau kelemahan desain program sejak tahap awal (Mukhid & others, 2023). Sistem berbasis data semacam ini sangat diperlukan dalam konteks Indonesia yang luas dan beragam, agar upaya literasi tidak bersifat homogen, melainkan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Selain sebagai pengarah kebijakan, pemerintah perlu memperkuat perannya sebagai agen perubahan budaya ekonomi, yang secara aktif mendorong pembentukan kesadaran publik mengenai pentingnya transaksi dan perilaku ekonomi yang sesuai nilai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Ketika kebijakan, teknologi, edukasi, dan budaya diarahkan pada nilai yang sama, maka ekosistem literasi ekonomi syariah dapat tumbuh secara kokoh dan berkelanjutan (Nur, Akib, & Niswaty, 2022).

**Peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai Agen Literasi Praktis**

Lembaga keuangan syariah memiliki posisi kunci sebagai pelaksana langsung dari sistem ekonomi Islam yang beroperasi di tengah masyarakat. Sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan publik dalam menyediakan layanan finansial, lembaga keuangan syariah tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga memikul tanggung jawab edukatif yang melekat. Literasi ekonomi Islam tidak akan dapat berkembang secara optimal tanpa keterlibatan aktif lembaga keuangan syariah dalam menyampaikan informasi yang benar, relevan, dan mudah dipahami oleh nasabah maupun masyarakat luas. Posisi strategis ini menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai agen literasi yang berada di garis terdepan, khususnya dalam menjembatani antara nilai-nilai normatif syariah dan realitas praktik ekonomi sehari-hari (Abdillah, 2021).

Sebagai agen literasi, lembaga keuangan syariah memiliki peluang besar untuk menanamkan pemahaman yang lebih aplikatif tentang konsep ekonomi Islam. Melalui layanan yang diberikan baik dalam bentuk simpanan, pembiayaan, maupun investasi lembaga tersebut dapat memperkenalkan prinsip-prinsip akad seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah secara langsung melalui pengalaman pengguna (Damayanti *et al.*, 2025). Hal ini menciptakan ruang edukatif yang lebih kontekstual dibandingkan sekadar paparan teoritis. Sayangnya, banyak lembaga keuangan syariah masih terjebak pada pendekatan transaksional, di mana fokus utama hanya terletak pada pencapaian target penyaluran produk, bukan pada pencerdasan nasabah terhadap struktur dan nilai syariah dari produk yang digunakan. Dalam situasi ini, nasabah cenderung menjadi pengguna pasif tanpa pemahaman yang memadai terhadap makna keislaman dari aktivitas ekonomi yang mereka jalani (Mashuri, n.d.).

Kualitas literasi yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Pegawai lini depan seperti petugas layanan, tenaga pemasar, hingga manajer cabang perlu memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi syariah, bukan sekadar pelatihan produk (Pratama, 2025). Sering kali ditemukan bahwa para tenaga pemasar kurang mampu menjelaskan secara konseptual perbedaan antara pembiayaan syariah dan pinjaman konvensional, terutama pada aspek non-riba dan keadilan kontraktual. Ketika edukasi yang diberikan hanya bersifat teknis, maka nilai-nilai filosofis dan sosial yang menjadi ciri khas ekonomi Islam tidak akan tersampaikan. Pelatihan berkelanjutan berbasis prinsip maqashid syariah, sertifikasi kompetensi syariah, dan penguatan spiritualitas kerja perlu ditanamkan secara sistematis agar lembaga keuangan syariah tidak hanya menjadi pelaksana transaksi, tetapi juga pendidik masyarakat (Katamsi & others, n.d.).

Selain melalui interaksi langsung, lembaga keuangan syariah juga memiliki tanggung jawab dalam memproduksi dan menyebarluaskan materi edukatif yang mudah diakses dan dimengerti oleh publik. Brosur, video edukasi, podcast, hingga platform digital interaktif dapat dijadikan media penyampaian literasi yang efektif. Saat ini, sebagian lembaga telah memulai pendekatan ini, tetapi keberhasilannya masih terbatas pada wilayah-wilayah perkotaan dengan penetrasi digital tinggi. Sebagian besar masyarakat pedesaan atau wilayah pinggiran belum tersentuh oleh materi literasi berbasis digital dari lembaga keuangan syariah. Selain itu, materi edukasi yang disampaikan seringkali terlalu formal dan tidak menyentuh realitas kehidupan ekonomi masyarakat kecil. Diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana, membumi, serta menggunakan bahasa lokal untuk meningkatkan efektivitas pemahaman.

Lembaga keuangan syariah juga dapat memainkan peran strategis melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diarahkan secara spesifik pada kegiatan literasi. Banyak lembaga yang memiliki dana CSR, tetapi alokasinya belum diarahkan secara konsisten di bidang pendidikan ekonomi Islam. Melalui kolaborasi dengan pesantren, perguruan tinggi, sekolah, dan komunitas dakwah, kegiatan CSR dapat disinergikan dengan misi edukatif yang lebih berdampak. Misalnya, program pembinaan ekonomi syariah berbasis desa, pelatihan keuangan syariah untuk pelaku UMKM, atau beasiswa literasi syariah bagi pelajar dan mahasiswa. Ketika lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada laba semata, tetapi juga pada pembangunan kapasitas masyarakat, maka dampak sosial dari institusi keuangan ini akan lebih terasa dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem syariah secara keseluruhan (Abdillah, 2021).

Dalam perspektif jangka panjang, peran lembaga keuangan syariah sebagai agen literasi praktis memerlukan komitmen struktural dari pimpinan tertinggi institusi. Edukasi harus dijadikan bagian dari strategi bisnis inti (core business strategy), bukan sekadar aktivitas tambahan. Manajemen lembaga perlu

mengintegrasikan indikator keberhasilan literasi ke dalam kinerja cabang, bukan hanya menilai keberhasilan dari sisi pertumbuhan dana atau pembiayaan. Langkah ini memerlukan perubahan paradigma kelembagaan, di mana keberhasilan lembaga tidak hanya diukur melalui neraca keuangan, tetapi juga melalui kualitas kontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang melek ekonomi Islam. Ketika lembaga keuangan syariah menjalankan peran literasi secara konsisten dan mendalam, maka kehadirannya akan lebih dari sekadar penyedia jasa finansial, melainkan sebagai motor penggerak transformasi nilai di tengah dinamika ekonomi umat (Syah, 2025).

Peran lembaga keuangan syariah sebagai agen literasi tidak hanya bersandar pada kapasitas institusional semata, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga tersebut menyadari bahwa penyebaran nilai syariah adalah bagian integral dari misi sosial keuangannya. Ketika lembaga hanya mengadopsi model manajemen konvensional yang diganti label halal, maka misi literasi mudah tereduksi menjadi aktivitas promosi produk. Pemahaman terhadap literasi syariah harus dibangun atas kesadaran bahwa edukasi merupakan instrumen dakwah muamalah yang sejalan dengan maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kegagalan lembaga keuangan syariah dalam menyampaikan nilai-nilai edukatif berkontribusi pada terbentuknya persepsi publik bahwa sistem ini hanya sekadar alternatif administratif dari sistem konvensional (Kaltsum, 2023).

Dalam konteks realitas operasional, banyak lembaga keuangan syariah belum mengembangkan model literasi yang partisipatif dan berbasis komunitas. Pendekatan yang digunakan masih berpusat pada institusi (institution-centered) dan belum menjangkau kanal sosial yang selama ini efektif dalam menjangkau masyarakat, seperti majelis taklim, koperasi pesantren, kelompok tani berbasis masjid, dan komunitas zakat lokal. Keberhasilan program literasi tidak ditentukan oleh seberapa banyak materi disampaikan, melainkan oleh seberapa relevan pendekatan itu terhadap kebutuhan dan latar belakang audiens. Misalnya, program literasi di kalangan petani akan lebih efektif jika disampaikan melalui simulasi pembiayaan ijarah atau salam berbasis hasil panen ketimbang ceramah satu arah mengenai teori muamalah (Yuniastuti & Khoiron, 2021).

Transformasi literasi dari sisi kelembagaan memerlukan rekonstruksi paradigma pemasaran lembaga. Aktivitas edukasi tidak boleh ditempatkan hanya sebagai alat penjualan produk, melainkan sebagai bagian dari proses membangun relasi kepercayaan jangka panjang dengan masyarakat. Kepercayaan tidak dibentuk melalui janji imbal hasil, tetapi melalui penyampaian informasi yang jujur, transparan, serta mudah dimengerti. Ketika nasabah merasa paham terhadap akad dan hak-kewajiban dalam produk yang digunakan, maka loyalitas dan kepercayaan akan tumbuh secara alami. Literasi bukan sekadar tugas hubungan masyarakat, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh unsur lembaga, dari frontliner hingga direksi. Dengan budaya organisasi yang

menempatkan edukasi sebagai nilai inti, maka setiap interaksi dengan masyarakat menjadi ruang belajar dua arah (Tampubolon, 2020).

Lembaga keuangan syariah juga harus mampu menyesuaikan strategi literasi terhadap konteks digital yang berkembang pesat. Generasi muda tidak lagi mencari informasi dari brosur, tetapi melalui video singkat, ulasan pengguna, dan diskusi komunitas di media sosial. Pemanfaatan teknologi tidak hanya mencakup penyebaran informasi, tetapi juga memungkinkan pengembangan modul literasi berbasis kebutuhan pengguna (user-driven). Misalnya, aplikasi mobile banking syariah dapat dilengkapi fitur edukatif interaktif yang menjelaskan akad secara real-time saat nasabah melakukan transaksi. Pendekatan ini akan mengintegrasikan literasi ke dalam proses penggunaan layanan secara alami. Inovasi digital yang cerdas dan berbasis prinsip akan menciptakan pengalaman edukatif yang berkesinambungan dan berdampak luas (Razilu, 2025).

Tanggung jawab literasi juga sepatutnya dipahami sebagai bagian dari amanah sosial yang diemban oleh lembaga keuangan syariah sebagai institusi publik berbasis nilai. Literasi yang kuat tidak hanya akan menghasilkan masyarakat yang paham terhadap produk, tetapi juga masyarakat yang kritis terhadap kualitas syariah dari lembaga itu sendiri. Ketika masyarakat telah tercerahkan, maka ruang untuk praktik syariah yang setengah hati akan semakin sempit. Transparansi, kesesuaian akad, kejelasan margin, serta akuntabilitas distribusi zakat dan dana sosial akan menjadi sorotan masyarakat yang cerdas. Literasi bukan hanya menciptakan pasar, tetapi juga menciptakan kontrol sosial terhadap integritas lembaga. Dalam konteks ini, literasi menjadi instrumen demokratisasi keuangan Islam, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi penjaga etika sistem (Wati & Fasa, 2025)

**Bentuk Sinergi antara Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah**

Pembangunan literasi ekonomi Islam tidak dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda. Pemerintah sebagai regulator memiliki otoritas dan infrastruktur kebijakan yang luas, sementara lembaga keuangan syariah memiliki posisi operasional di tingkat masyarakat yang memungkinkan penerapan langsung nilai dan prinsip ekonomi Islam. Kolaborasi dua aktor ini dapat melahirkan program literasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menyentuh praktik keseharian umat. Sinergi ini mencerminkan prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong yang menjadi inti dari sistem sosial Islam (Hamizar, Tubalawony, Yaman, & others, 2024).

Bentuk sinergi dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program edukasi publik yang dirancang bersama. Pemerintah melalui OJK, KNEKS, atau Bank Indonesia dapat menyediakan kerangka modul literasi berbasis kurikulum nasional, sementara lembaga keuangan syariah menjadi pelaksana langsung di

lapangan. Dalam format ini, pembagian peran menjadi jelas: negara menyediakan arah, sedangkan industri keuangan menjadi eksekutor. Kegiatan literasi dapat dilaksanakan melalui sekolah, pesantren, komunitas masjid, dan organisasi sosial keagamaan. Sinergi ini memberikan keuntungan ganda: lembaga keuangan syariah tidak perlu merancang ulang materi, dan pemerintah dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya belum tersentuh oleh program literasi reguler (Rizqia, 2020).

Kolaborasi juga dapat diwujudkan melalui integrasi kurikulum ekonomi syariah di tingkat pendidikan formal. Pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag dapat memasukkan literasi keuangan syariah sebagai bagian dari pelajaran ekonomi atau keagamaan di sekolah. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai mitra praktik lapangan melalui penyediaan simulasi pembiayaan, tabungan pelajar berbasis syariah, atau pelatihan guru mengenai akad-akad dasar. Upaya ini akan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap konsep ekonomi Islam secara aplikatif sejak usia dini. Integrasi pendidikan dan praktik industri akan menciptakan ekosistem literasi yang menyatu dan berkelanjutan (Rahmayanti, Qurrotu'ain, Ramadhani, & Azis, 2025).

Sinergi strategis lainnya dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur platform digital nasional untuk edukasi keuangan syariah, sementara lembaga keuangan syariah berperan mengisi konten berbasis pengalaman dan praktik aktual. Kolaborasi ini akan mencegah terjadinya duplikasi serta memperkaya variasi konten edukatif. Misalnya, peluncuran aplikasi edukatif bersama yang menjelaskan akad-akad syariah melalui animasi atau kuis interaktif dapat menjangkau generasi digital native yang membutuhkan pendekatan komunikatif dan visual. Teknologi juga memungkinkan evaluasi efektivitas literasi secara real-time melalui feedback pengguna, sehingga program dapat terus disempurnakan secara dinamis (Priatna, 2025).

Program sinergi juga perlu diperkuat melalui kemitraan strategis yang melibatkan komunitas akar rumput. Lembaga keuangan syariah dan instansi pemerintah daerah dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan pelatihan keuangan syariah berbasis desa, pemberdayaan UMKM melalui skema pembiayaan berbasis akad qardh atau mudharabah, serta pendampingan literasi berbasis kelompok seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau koperasi pesantren. Bentuk sinergi ini lebih adaptif terhadap karakter lokal dan memungkinkan pemanfaatan potensi sosial masyarakat secara optimal. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi secara kognitif, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang mandiri dan beretika (Farid & others, 2023).

Keberhasilan sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat ditentukan oleh kesamaan visi dan konsistensi pelaksanaan. Tanpa komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, kolaborasi akan berisiko menjadi formalitas administratif tanpa hasil yang substansial. Perlu dibentuk mekanisme koordinasi permanen, misalnya forum lintas kelembagaan yang secara rutin

mengevaluasi capaian literasi, merumuskan kebijakan bersama, serta menyusun rencana aksi jangka menengah dan panjang. Koordinasi ini juga akan mendorong efisiensi penggunaan anggaran, mempercepat distribusi sumber daya, dan menciptakan budaya kerja kolaboratif yang lebih produktif (Ita, 2023)

Dalam konteks penguatan struktur sosial ekonomi umat, sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah bukan sekadar strategi teknokratis. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Ketika dua entitas utama ini saling memperkuat dalam satu arah yang sama, maka literasi tidak akan berhenti pada penguasaan istilah atau pengenalan produk, tetapi akan tumbuh menjadi kesadaran kolektif untuk membangun kehidupan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai ilahiah dan kemaslahatan publik.

Kekuatan sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah terletak pada kemampuannya menggabungkan otoritas kebijakan negara dengan daya jangkau sosial yang dimiliki lembaga. Ketika pemerintah menyediakan kebijakan dan infrastruktur edukatif, lembaga keuangan syariah bertugas memfasilitasi praktik nyata yang mampu menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara langsung. Kombinasi ini memungkinkan terciptanya ruang edukatif yang tidak hanya menyampaikan konsep, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengalami dan merasakan nilai dari praktik ekonomi Islam dalam kehidupan mereka. Ketika teori dan praktik dipadukan dalam satu kesatuan gerak, maka literasi menjadi lebih kuat karena tidak hanya menyentuh pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran dan pengalaman kolektif (Ristanti, 2023).

Sinergi juga dapat dimaknai sebagai proses saling memperkuat antara kelembagaan negara dan industri syariah. Ketika lembaga keuangan syariah menjalankan program literasi di wilayah pedalaman atau masyarakat marginal, maka mereka membutuhkan perlindungan dan dukungan dari negara, baik melalui pendanaan, izin operasional, maupun pengakuan kebijakan. Sebaliknya, negara membutuhkan aktor pelaksana di lapangan agar misi literasi nasional tidak berhenti pada tataran dokumen perencanaan. Ketergantungan positif ini membuka ruang bagi pembentukan tata kelola kolaboratif yang berbasis pada prinsip gotong royong, di mana keberhasilan bukan hanya milik satu pihak, tetapi merupakan capaian kolektif yang dibangun melalui kerja sama yang konsisten dan saling menghormati (Setyawanto, Astutiek, Hariyadi, & Ikhwandi, 2025).

Lebih jauh, bentuk sinergi juga dapat dikembangkan melalui desain insentif yang mendorong partisipasi sektor swasta keuangan syariah dalam program literasi nasional. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau kemudahan regulasi bagi lembaga yang secara aktif melaksanakan program literasi berbasis masyarakat. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah dapat mengalokasikan sebagian anggaran CSR mereka untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam hal peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk

halal, inklusi pembiayaan mikro syariah, atau pelatihan digital keuangan syariah berbasis komunitas. Ketika insentif dikelola secara transparan dan terukur, maka sinergi akan berkembang bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena kesadaran bersama terhadap urgensi pendidikan ekonomi umat (Sumarlin, Siradjuddin, Syarifuddin, & Jamaluddin, 2024).

Perlu dicatat bahwa sinergi yang ideal bukanlah sinergi simbolik yang hanya ditandai oleh MoU atau seremoni peluncuran program, melainkan sinergi substantif yang menyatu pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kolaborasi yang bersifat parsial seringkali gagal menciptakan dampak jangka panjang karena tidak dilandasi oleh perumusan kebutuhan bersama dan indikator keberhasilan yang disepakati sejak awal. Oleh sebab itu, perlu dibentuk satu model manajemen kolaboratif yang memungkinkan lembaga pemerintah dan keuangan syariah duduk bersama secara periodik untuk membahas progres, tantangan, dan inovasi dalam pelaksanaan literasi ekonomi Islam. Pertemuan ini dapat difasilitasi oleh forum resmi di bawah koordinasi KNEKS atau OJK, yang bertugas menjadi penjaga arah sinergi dan penghubung lintas institusi (Amran & others, 2023).

Keberlanjutan sinergi juga memerlukan komitmen terhadap penyelarasan nilai, bukan hanya penyelarasan target. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu memiliki pandangan yang sama bahwa literasi bukan hanya alat untuk memperbesar pangsa pasar, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk masyarakat yang adil, sadar etika, dan bertanggung jawab secara sosial. Ketika nilai ini dijadikan fondasi kolaborasi, maka sinergi akan bergerak lebih dalam dari sekadar distribusi informasi menuju transformasi budaya ekonomi. Masyarakat tidak hanya paham apa itu akad syariah, tetapi juga memahami alasan moral dan spiritual mengapa mereka perlu memilih sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Proses ini menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang tidak hanya tumbuh dari sisi aset, tetapi juga kuat dari sisi pemahaman dan partisipasi masyarakat (Mukhlas, 2025).

## Dampak Sinergi terhadap Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi dan perluasan inklusi keuangan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Ketika intervensi dilakukan secara terstruktur melalui kombinasi regulasi, edukasi, dan implementasi layanan, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga berkembang menjadi subjek aktif dalam proses transformasi keuangan. Peningkatan angka literasi keuangan syariah yang tercatat dalam beberapa laporan nasional bukanlah hasil kebetulan, melainkan hasil dari kerja kolaboratif yang sistematis dan berkelanjutan. Survei literasi yang dilakukan OJK menunjukkan adanya peningkatan persepsi masyarakat terhadap produk keuangan syariah, terutama pada segmen muda dan pelaku usaha mikro, yang

merupakan indikator awal keberhasilan dari proses sinergi tersebut (Lesmana & others, 2024).

Efektivitas sinergi terlihat dari meningkatnya permintaan terhadap layanan keuangan berbasis syariah yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Program-program pembiayaan mikro berbasis akad syariah yang difasilitasi oleh lembaga keuangan syariah, dengan dukungan dari regulasi dan sosialisasi pemerintah, telah mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang lebih sadar nilai. Mereka tidak hanya melihat keuangan sebagai alat pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai media penguatan moralitas dan tanggung jawab sosial. Semakin banyak pelaku UMKM yang memilih skema pembiayaan tanpa riba, serta mulai memahami hak dan kewajiban berdasarkan akad, menandakan bahwa peningkatan literasi telah mempengaruhi pola pikir ekonomi masyarakat (Nabila Sekar Sari, 2025).

Dampak sinergi juga dapat ditelusuri melalui perluasan titik layanan keuangan syariah di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau. Program bersama antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah, seperti pendirian layanan syariah digital di desa, pembukaan BMT berbasis komunitas, serta pelatihan daring untuk guru ekonomi Islam, telah memperkuat jangkauan literasi sekaligus aksesibilitas terhadap layanan. Peningkatan ini tercermin dari pertumbuhan jumlah rekening nasabah syariah, peningkatan volume pembiayaan halal, serta tingginya animo terhadap program-program literasi berbasis teknologi seperti web edukasi, e-learning syariah, dan aplikasi mobile pembelajaran keuangan Islam. Konvergensi antara literasi dan inklusi menjadi ciri khas utama dari keberhasilan sinergi tersebut (Kulup, 2024).

Penguatan literasi juga membawa dampak positif terhadap kualitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi syariah. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi pengguna pasif layanan keuangan, tetapi juga mulai menunjukkan sikap selektif dan kritis terhadap kualitas syariah suatu produk. Mereka mulai mempertanyakan struktur akad, kejelasan margin, dan kepatuhan produk terhadap fatwa. Kondisi ini memaksa lembaga keuangan untuk lebih transparan dan konsisten dalam menjaga integritas syariah. Sinergi yang baik menciptakan ruang kritik konstruktif, di mana masyarakat yang teredukasi menjadi pengawas sosial terhadap lembaga keuangan. Proses ini menjadi salah satu bentuk kontrol publik yang sehat dan berkontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan sistem keuangan syariah nasional (Mujadid, Barlaman, Mu'nisah, & Hamidah, 2024).

Tidak hanya itu, sinergi juga memperkuat legitimasi sosial terhadap keuangan Islam sebagai bagian dari solusi ekonomi nasional. Ketika pemerintah secara terbuka mendukung inisiatif literasi syariah dan menjadikannya bagian dari program prioritas nasional, maka muncul kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Lembaga keuangan syariah yang sebelumnya hanya dipandang sebagai alternatif, mulai diakui sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kepercayaan publik ini semakin menguat ketika

mereka merasakan manfaat nyata dari penggunaan produk syariah yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan keyakinan spiritual mereka (Afandi et al., 2022).

Sinergi yang terbangun antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah juga memberikan dampak terhadap transformasi orientasi masyarakat terhadap keuangan. Jika sebelumnya masyarakat menganggap aktivitas keuangan hanya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan konsumtif atau pemanfaatan fasilitas kredit, maka melalui proses edukatif dan pembiasaan nilai, mereka mulai mengembangkan persepsi bahwa pengelolaan keuangan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan etika individu. Pemahaman terhadap prinsip kehalalan transaksi, keadilan dalam akad, serta keberkahan harta menjadi pertimbangan baru yang mulai menggeser dominasi logika materialistik dalam pengambilan keputusan keuangan. Transformasi semacam ini merupakan capaian yang lebih dalam dari sekadar peningkatan angka literasi, karena menyentuh dimensi nilai yang bersifat transendental dan berkelanjutan (Khasanah, 2022).

Perubahan persepsi tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai produk keuangan syariah yang bersifat investasi dan pemberdayaan. Program sukuk ritel, tabungan emas syariah, dan pembiayaan wakaf tunai semakin diminati oleh kelompok masyarakat menengah yang telah tercerahkan secara literasi. Mereka mulai melihat bahwa keuangan bukan hanya sarana mendapatkan keuntungan, tetapi juga wahana untuk berbagi manfaat dan memperkuat sistem ekonomi umat. Perubahan ini menunjukkan bahwa ketika sinergi dijalankan secara konsisten, maka pengaruhnya tidak hanya terbatas pada dimensi struktural (seperti jumlah nasabah atau volume aset), tetapi juga menyentuh dimensi kultural yang membentuk karakter masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang sadar nilai (Asmawiyah & others, 2020).

Di sisi lain, sinergi juga memperkuat kapasitas lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang kredibel. Keikutsertaan lembaga dalam program-program nasional bersama pemerintah meningkatkan citra kelembagaan sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas sektor. Kegiatan edukatif yang sebelumnya bersifat sporadis dan terbatas pada promosi produk, mulai berkembang menjadi gerakan literasi yang melibatkan komunitas, akademisi, dan media. Pengakuan formal dari pemerintah terhadap kontribusi lembaga keuangan syariah dalam membangun literasi memperkuat posisi mereka sebagai aktor pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki misi sosial dan dakwah ekonomi. Keberadaan lembaga keuangan syariah mulai dipandang sebagai aset nasional yang turut berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berbasis nilai dan keadilan (Silitonga & others, 2023).

Dampak sinergi juga menciptakan budaya kolaboratif baru antara sektor publik dan swasta, yang sebelumnya cenderung berjalan sendiri-sendiri. Ketika kedua entitas saling memperkuat, maka ruang kompetisi bergeser menjadi ruang konvergensi misi. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor penyedia edukasi, dan lembaga keuangan syariah tidak lagi hanya bertugas menjual

produk. Keduanya menjadi mitra dalam proses pemberdayaan ekonomi berbasis nilai, yang bekerja secara simultan dalam menciptakan masyarakat yang paham, percaya, dan terlibat aktif dalam sistem keuangan syariah. Ekosistem yang tumbuh dari sinergi ini memperlihatkan bahwa kolaborasi bukan hanya strategi administratif, tetapi menjadi pola kerja yang membentuk integritas gerakan literasi ekonomi Islam secara nasional (Mushonnif, Al Fajar, Mudfainna, & Syamraeni, 2025).

Pengaruh sinergi juga mulai merambat pada perubahan desain kebijakan di tingkat daerah. Beberapa pemerintah daerah mulai menjadikan literasi keuangan syariah sebagai bagian dari program prioritas pembangunan ekonomi lokal. Program pelatihan, sosialisasi, dan pelibatan tokoh agama serta guru-guru madrasah semakin diintensifkan untuk menciptakan efek berantai yang lebih luas. Lembaga keuangan syariah juga semakin adaptif dalam merespons kebutuhan lokal, seperti menyediakan produk pembiayaan berbasis komunitas, atau memfasilitasi kerja sama antar pelaku usaha mikro dalam satu klaster ekonomi berbasis syariah. Perubahan ini memperkuat posisi sinergi sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam menumbuhkan daya tahan ekonomi berbasis nilai di tingkat akar rumput (Nugraha, 2025).

Keseluruhan dampak dari sinergi ini menunjukkan bahwa ketika program literasi dikelola secara kolaboratif dan berbasis nilai, maka hasilnya tidak hanya terukur secara kuantitatif, tetapi juga terasa secara kualitatif di tengah masyarakat. Literasi bukan lagi sekadar agenda regulatif atau formalitas promosi lembaga, melainkan telah menjelma menjadi gerakan sosial yang memperkuat struktur ekonomi umat dari dalam. Tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan sinergi tersebut agar tidak tergantung pada pergantian pejabat atau kepemimpinan lembaga. Keberlanjutan hanya dapat dicapai melalui institusionalisasi sinergi sebagai bagian dari sistem nasional, dengan struktur koordinasi yang kuat, indikator capaian yang terukur, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai pemilik dan penerima manfaat dari gerakan literasi ekonomi Islam (Firda Sari, n.d.).

Salah satu indikator penting dari keberhasilan sinergi adalah terciptanya ekosistem pembelajaran ekonomi syariah yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Ketika sinergi berjalan secara konsisten, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi satu arah, melainkan terlibat sebagai pelaku aktif yang mereproduksi pengetahuan melalui forum-forum lokal, kegiatan komunitas, dan inisiatif kolektif berbasis nilai Islam. Dalam konteks ini, penguatan literasi telah melahirkan masyarakat belajar, yaitu kelompok sosial yang tidak hanya memahami ekonomi syariah sebagai sistem keuangan, tetapi sebagai bagian dari etika sosial dan tanggung jawab umat. Proses ini memperlihatkan bahwa sinergi memiliki daya dorong bukan hanya terhadap inklusi finansial, tetapi juga terhadap pembangunan budaya ekonomi yang lebih etis dan adil (Septia & Amiruddin, 2023).

Keberhasilan sinergi juga tercermin dari terbangunnya relasi saling percaya antara masyarakat dan institusi keuangan. Ketika masyarakat mendapatkan informasi secara jelas, akurat, dan konsisten, maka kepercayaan terhadap produk dan lembaga penyedia jasa keuangan akan tumbuh secara organik. Relasi ini sangat penting dalam konteks ekonomi syariah, karena kepercayaan tidak hanya bersumber dari efisiensi produk, tetapi juga dari komitmen terhadap prinsip-prinsip akhlak dan tanggung jawab sosial. Kepercayaan ini pada akhirnya memperkuat loyalitas nasabah, memperluas jangkauan pasar, dan menumbuhkan iklim bisnis yang lebih sehat. Lembaga yang dipercaya tidak lagi dipandang semata sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai bagian dari gerakan sosial yang bertujuan memuliakan umat melalui sistem ekonomi yang lebih manusiawi (Darmalaksana, 2022).

Efek sinergi juga meluas pada tingkat pengambilan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah yang melihat keberhasilan program sinergi mulai menyusun kebijakan yang lebih inklusif terhadap literasi ekonomi Islam, misalnya melalui penguatan kurikulum, pemberian insentif bagi lembaga aktif literasi, atau integrasi program literasi ke dalam rencana pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi tidak hanya menghasilkan perubahan pada tataran masyarakat, tetapi juga mendorong reformasi kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan syariah secara menyeluruh. Keputusan ini menunjukkan bahwa literasi dan inklusi tidak lagi dipahami sebagai kegiatan sektoral, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang menempatkan nilai keislaman sebagai pondasi penting kehidupan berbangsa (Yessi, 2024).

Dengan berbagai capaian tersebut, sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan literasi ekonomi Islam. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa literasi tidak cukup bila hanya diserahkan kepada satu pihak, melainkan perlu dibangun melalui jaringan kerja kolaboratif yang menempatkan umat sebagai subjek transformasi. Peran aktif lembaga, dukungan kebijakan, keterlibatan masyarakat, serta kesinambungan program menjadi unsur yang saling menguatkan dalam proses ini. Ketika semua elemen ini berjalan seirama, maka bukan hanya inklusi yang akan tercapai, tetapi juga terbentuknya masyarakat ekonomi Islam yang mandiri, cerdas, dan berintegritas (Rahmat, n.d.).

## Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah memegang peranan penting dalam mendorong peningkatan literasi ekonomi Islam di Indonesia. Keterlibatan aktif pemerintah sebagai pengarah kebijakan serta peran lembaga keuangan syariah sebagai pelaksana literasi praktis telah menciptakan ekosistem kolaboratif yang lebih terarah dan terstruktur. Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap prinsip ekonomi

Islam tidak hanya menjadi kendala bagi pengembangan industri keuangan syariah, tetapi juga menandakan adanya kesenjangan pemahaman yang memerlukan intervensi sistematis melalui pendekatan multi-aktor dan lintas sektor.

Bentuk sinergi yang berkembang mencakup kolaborasi dalam penyusunan program edukatif, integrasi kurikulum ekonomi Islam, serta penguatan literasi berbasis teknologi dan komunitas. Hasil dari sinergi ini tercermin pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, perluasan inklusi keuangan, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi berbasis nilai. Selain itu, interaksi yang semakin intens antara regulator, lembaga, dan masyarakat turut menciptakan kontrol sosial baru yang mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah dalam menjaga prinsip-prinsip syariah.

Namun demikian, tantangan masih muncul dari minimnya standardisasi literasi, belum optimalnya koordinasi lintas lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam menyampaikan edukasi secara substantif dan kontekstual. Disparitas wilayah dan kesenjangan akses informasi juga turut memperkuat hambatan literasi, khususnya di daerah tertinggal dan kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Keberhasilan sinergi yang sudah tercapai saat ini berpotensi stagnan apabila tidak disertai dengan upaya institusionalisasi yang lebih kuat serta dukungan kebijakan yang bersifat lintas kementerian dan terintegrasi secara nasional.

Berdasarkan hasil temuan, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan struktur koordinasi nasional literasi ekonomi Islam, peningkatan kapasitas pelaku edukasi melalui pelatihan berbasis prinsip maqashid syariah, serta penyusunan modul edukasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian literasi ekonomi Islam serta implikasi kebijakan praktis dalam perumusan program literasi berbasis nilai dan sinergi kelembagaan.

## Daftar Pustaka

Abdillah, Rony. (2021). *Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19 (Analisis Dampak Liquiditas dan Laporan Keuangan pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia wangon Banyumas)*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia).

Afandi, Syed Agung, Erdayani, Rizki, & others. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*.

Afriyanti, Delima, & Fadillah, Nur. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah: Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau. *Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *3*(1), 48–57.

Aldana, Lavia Vega. (2023). *(kesediaan publikasi belum ada, silakan upload ulang..) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH DOMPET DHUAFA (Studi pada Kelompok Peternak Sapi Perah di Desa Singolangu Kabupaten Magetan)*. IAIN PONOROGO.

Amalia, Euis, Rahmatillah, Indra, & Muslim, Bukhari. (2023). *Penguatan Ukm Halal Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah)*. Samudra Biru.

Amran, Hairil, & others. (2023). *Collaborative Process Dalam Mengelola Objek Wisata Alam Mendatte Park di Kabupaten Enrekang= Collaborative Process in Managing Mendatte Park Natural Tourism Objects in Enrekang Regency*. Universitas Hasanuddin.

Anwar, Aep Saepul. (2020). Pengembangan sikap profesionalisme guru melalui kinerja guru pada satuan pendidikan MTs Negeri 1 Serang. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, *2*(1), 147–173.

Anwar, Desy Rahmawati, Sumarlin, Sumarlin, & Abdullah, Wahyuddin. (2025). Reconstructing Revenue Management Ethics in Islamic Finance: a Maqashid-Based Integrity Model and Empirical Framework. *Formosa Journal of Applied Sciences*, *4*(6), 1743–1762.

Ardiansyah, Muhammad Ridho, Kom, S., Kom, M., Wibisono, Ir Hendar Ahmad, Kom, S., Ma'arif, Minhatul, Syaftriandi, Muhammad Jhonsen, Kom, S., Kom, M., Edy, Marwan Ramdhany, & others. (2025). *DASAR-DASAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN*. Penerbit Widina.

Arifin, Abdul, & others. (n.d.). *Relevansi Pajak Perdagangan (Dharibah Altijarah Dan Bea Cuaki Dalam Kebijakan Fiskal Negara: Perspektif Siyasah Maliyah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Arifin, Nur. (2025). Pendidikan Karakter di Era Digital. *Penerbit Tahta Media*.

Asmawiyah, Asmawiyah, & others. (2020). *BUDAYA ORGANISASI, KARAKTERISTIK PEMILIK DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KINERJA USAHA (Studi pada Usaha Kecil Menengah di Sulawesi Selatan)*. Universitas Hasanuddin.

Azam, Shelna Azima. (2024). *Optimalisasi Instagram Dalam Meningkatkan Kesadaran Halal (Studi Pada Situs:@ Halalcorner \&@ Halal. indonesia)*. IAIN PONOROGO.

Damayanti, Arisma, Rusmini, Rusmini, Azizah, Andini Nur, Fitriya, Rodotul, Mayangsari, Dewi, & others. (2025). Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, *3*(1), 101–122.

Darmalaksana, Wahyudin. (2022). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan*

*Syariah*. Sentra Publikasi Indonesia.

Farid, Ahmad, & others. (2023). Literasi digital sebagai jalan penguatan pendidikan karakter di era Society 5.0. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *6*(3), 580–597.

Fauziyanti, Wachidah, Estuti, Eni Puji, Hendrayanti, Silvia, Ernawati, Fidyah Yuli, & Budiyono, Rokhmad. (2022). *Buku Ajar Koperasi Untuk Perguruan Tinggi* (Vol. 1). Penerbit NEM.

Habiburrohman, Muhammad. (2021). *Muslim Cina benteng: potret inklusifitas etno-religious Tionghoa di Tangerang*. Stelkendo.

Hamizar, Arizal, Tubalawony, Jacsy, Yaman, Afdhal, & others. (2024). Challenges in regulation and opportunities in sharia financial management. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(1), 50–62.

Hanafi, Sofyan. (2023). *ANALISIS PENGARUH DIGITALISASI MELALUI SELF SERVICE BANKING TECHNOLOGY TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARI'AH MASYARAKAT PEDESAAN*.

Hidayah, Nur. (2021). *Literasi Keuangan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.

Hidayat, Sutan Emir, & Ali, A. M. Hasan. (2024). *Akselerator Gerakan Ekonomi Syariah*. Sekretariat Wakil Presiden.

Irawan, Deni. (2025). Strategi Komunikasi Dakwah (Studi Analisis Dakwah Tradisonal dengan Inovasi Digital). *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, *8*(1), 1–16.

Iskandar, Vido. (2024). *Entrepreneurship in Food \& Beverage, Beyond the Classroom*. UNJ Press.

Ita, Evina. (2023). *MANAJEMEN STRATEGIS KEPALA MADRASAH PASCA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus pada MIN Lampung Timur)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Kaltsum, Ummu. (2023). *Pengaruh Green Intellectual Capital dan Etika Lingkungan Perusahaan Terhadap Green Compettive Advantage (Studi Bank Syariah di Bima)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta.

Katamsi, Etom, & others. (n.d.). *Integrasi Model Sharia Governance Dan Balanced Scorecard Untuk Kinerja Bisnis Koperasi Syariah Berkelanjutan*.

Kecil, Pada Pelaku Usaha Mikro dan, & Muthoharoh, Siti Lu'lu'il Maknun. (n.d.). *STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL*.

KEUANGAN, PADANG LAWAS DENGAN LITERASI, & ISRO'HARAHAP, A. L. I. (n.d.). *PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD*

*ADDARY PADANGSIDIMPUAN*.

Khasanah, Umrotul. (2022). *Ekonomi Islam: Reformulasi sistem keuangan syariah*. Inara Publisher.

Kulup, BIina Buono. (2024). *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Masyarakat Petani Padi Di Provinsi Lampung*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Leniwita, Ns Hasian, Kep, M., Purnamawati, Tri, Kep, M., An, Sp Kep, Lema, Ns Elizabeth Risha Murlina, Kep, M., Ns, B. Antonelda M., Kep, M., Anggraini, Ns Yanti, & others. (2023). *DOKUMENTASI KEPERAWATAN*. Rizmedia Pustaka Indonesia.

Lesmana, Ferdi, & others. (2024). *Implementasi Sistem E-Antre dalam Situs Web Sistem Layanan Administrasi Cepat Dari Rumah (SILANCAR) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis*. Politeknik STIA LAN Jakarta.

Mashuri, Zulfi Nabhin. (n.d.). *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PETERNAKAN AKAR RUMPUT DI DESA TAYEM TIMUR KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP*.

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. (2022). Tanfidz Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022. *Surakarta. Https://Muhammadiyah. or. Id/Download/Tanfidz-Ke$\neg$ Putusan-Muktamar-Ke-48-Muhammadiyah-Tahun-2022*.

Muhtar, Mohamad Hidayat. (n.d.). BAB 5 PENELITIAN HUKUM NORMATIF. *Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum*, *57*.

Mujadid, Shofam Amim, Barlaman, M. Lady Malfidi, Mu'nisah, Meitri Nur, & Hamidah, Sulistia. (2024). *GOODNESS FOR DIGNITY: Human Initiative*. PT. Penerbit Qriset Indonesia.

Mukhid, M. Pd, & others. (2023). *Disain teknologi dan inovasi pembelajaran dalam budaya organisasi di lembaga pendidikan*. Pustaka Egaliter. Com.

Mukhlas, Oyo S. (2025). *LEGAL SYSTEM DAN IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. Penerbit Widina.

Mukhlisin, Murniati. (2022). *Politik Ekonomi Syariah Dalam Perspektifal-Qur'an (Analisis Sektor Industri Halal Di Indonesia)*. Institut PTIQ Jakarta.

Mushonnif, Mushonnif, Al Fajar, Adam Hafidz, Mudfainna, Mudfainna, & Syamraeni, Syamraeni. (2025). Inovasi Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Agrowisata: Studi Kasus Kampung Flory, Sleman. *Journal of*

*Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)*, *7*(2), 143–154.

Naini, Wasis Nur. (2023). *Edukasi Bankziska Ponorogo untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok Al-Gharimin*. IAIN Ponorogo.

Nugraha, Junjun Arip. (2025). EKONOMI SYARIAH, MCDA-WDMA DAN PENTAHELIX COLLABORATION DI KOTA TASIKMALAYA. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *6*(1), 71–93.

Nur, Andi Cudai, Akib, Haedar, & Niswaty, Risma. (2022). *Eksistensi Administrasi Publik Pada Arus Globalisasi*. Badan Penerbit UNM.

Pratama, Gilang Akbar. (2025). *Analisis Pengembangan Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat KCP Kota Metro*. IAIN Metro.

Priatna, Agus. (2025). Peran Generasi Muda Dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia Pada Era Digital. *Journal of Islamic Finance and Ekonomics*, *2*(02), 240–253.

Rahman, Yunita Rhamadhanty. (2024). *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah*. IAIN ParePare.

Rahmat, Irfab Sabikur. (n.d.). *SCENARIO PLANNING PADA PROGRAM SEKOLAH ORANG TUA HEBAT (SOTH) SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGSs) KE-4 DI KABUPATEN JEMBER*.

Rahmayanti, Nur Siti, Qurrotu'ain, Nisrina, Ramadhani, Novia, & Azis, Abdul. (2025). Tantangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi dalam Menjaga Nilai-Nilai Keislaman. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, *2*(1), 105–116.

Razilu, Zila. (2025). *INOVASI PEMBELAJARAN Integrasi Artificial Intelligence dalam Teknologi Pendidikan*. Penerbit Widina.

Ristanti, Irma. (2023). Digitalisasi Perencanaan Pendidikan Islam Di Madrasah. *Mapendis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(1), 56–107.

Rizqia, Luthfi Mafatihu. (2020). *Pengelolaan zakat berbasis masjid perkotaan: Pemahaman Fikih Dan Hukum positif*. Edu Publisher.

Rofiullah, Ahmad Hendra. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *7*(2), 24–43.

Sari, Firda. (n.d.). BAB 3 TEKNOLOGI PENDIDIKAN \& TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *ISU-ISU KONTEMPORER PENDIDIKAN ISLAM*, 25.

Sari, Nabila Sekar. (2025). Strategi Pengembangan Bisnis Syariah dalam Mewujudkan Bisnis Berkelanjutan. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, *2*(2), 207–221.

Sasbianto, Try, Dimas, Asrullah, Saleh, Nur Amin, & others. (2025). *Insan cita 2045*. PT. Nas Media Indonesia.

Septia, Tika, & Amiruddin, M. (2023). Pemberdayaan Infrastruktur Keagamaan Melalui Legalisasi Tanah Wakaf di Desa Tamansatriyan Tirtoyudo. *Jurnal Aksi Afirmasi*, *4*(2), 119–129.

Setyawanto, Agus, Astutiek, Dwi, Hariyadi, Bachtiar, & Ikhwandi, Ripin. (2025). REVITALISASI RANTAI DISTRIBUSI BERBASIS KELEMBAGAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI JAGUNG. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(2), 168–180.

Silitonga, Saor, & others. (2023). *PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN MODAL SOSIAL DENGAN MEDIASI JANGKAUAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI KOTA MAKASSAR= THE INFLUENCE OF FINANCIAL LITERACY AND SOCIAL CAPITAL USING THE REACH OF FINANCIAL INSTITUTIONS ON THE EFF*. Universitas Hasanuddin.

Sulaeman, Moh Muklis. (2025). Peran Strategi Integratif Optimalisasi Sistem Informasi Bisnis berbasis Teknologi Digital untuk Meningkatkan Produktivitas Karyawan melalui Pendekatan Manajemen Personalia Berkelanjutan. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*(1), 553–562.

Sumarlin, Abdul, Siradjuddin, Siradjuddin, Syarifuddin, Syarifuddin, & Jamaluddin, Nurlaeli. (2024). Pembiayaan Layanan Jasa Keuangan Industri Halal. *Economics and Digital Business Review*, *5*(2), 665–682.

Syah, Amirul. (2025). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah (Prinsip dan Aplikasinya)*. umsu press.

Tampubolon, Manahan P. (2020). *Change management: manajemen perubahan: individu, tim kerja, organisasi*. Mitra Wacana Media.

Tri Wahyuni, WIDOWATI. (2023). *OPTIMALISASI LITERASI FINANSIAL DI JURUSAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG*. UNIVERSITAS LAMPUNG.

Ulfanur, Maulina, Asysyura, Asysyura, Isra, Marzuti, & Eryani, Eryani. (2024). Kebijakan Pemerintah terhadap Tapera di Indonesia; Analisis Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, *16*(1), 277–293.

Wati, Risma, & Fasa, Muhammad Iqbal. (2025). Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi

Perbankan Syariah di Indonesia. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, *4*(2), 105–118.

Yessi, Avita Sari. (2024). *ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL, KEWIRAUSAHAAN, TEKNOLOGI, DAN PERAN PEMERINTAH TERHADAP P ERTUMBUHAN EKONOMI RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Provinsi Lampung)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Yudhira, Ahmad. (2024). Peran Dakwah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah: Studi pada Pasar Sukuk di Indonesia. *Jurnal Syiar-Syiar*, *4*(2), 86–101.

Yuniastuti, Miftakhuddin, & Khoiron, Muhammad. (2021). Media pembelajaran untuk generasi milenial. *Surabaya: Scorpindo Media Pustaka*.

Copyright holder:

Nurul Fadila, Fadly Yashari Soumena (2025)

**First publication right:**

Jurnal Ekonomi Islam

**This article is licensed under:**